

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran dalam menunjukkan ekonomi yang berkembang pada tahun saat ini dengan tahun sebelumnya merupakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi saat ini memiliki nilai yang tinggi dari pada tahun sebelumnya dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan serta sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan apabila pertumbuhan ekonomi tahun saat ini lebih rendah dari pada tahun sebelumnya. Persentase pada pendapatan yang berbeda secara nasional atau diartikan sebagai Produk Domestik Bruto tahun yang dikehendaki dengan tahun sebelumnya dapat dinyatakan sebagai perkembangan pada perekonomian (Sukirno, 2006)

Tiap daerah memiliki potensi alam yang berbeda, tentunya tingkat dari pertumbuhan ekonomi pada masing – masing wilayah berbeda pula. Keberhasilan dari pemerintah daerah dapat diukur dari pengalokasian potensi wilayah yang tersedia, tentu hal ini berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Menelaah keadaan ekonomi dalam suatu wilayah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mana merupakan keseluruhan nilai pada masing – masing unit dalam suatu daerah. PDRB memiliki dua kriteria yang pertama atas dasar harga konstan atau ADHK serta atas dasar harga berlaku atau ADHB.

Mengetahui keadaan pertumbuhan ekonomi tiap tahun dapat menggunakan atas dasar harga konstan sedangkan untuk mengetahui harga barang serta pelayanan atau pergerakan dari struktur ekonomi wilayah dapat menggunakan atas dasar harga berlaku. Mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, dapat dilakukan dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto tahun ini dengan Produk Regional Domestik Bruto tahun sebelumnya atau dapat digambarkan dengan rumus berikut ini:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi tahun}_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

Keterangan:

1. t = tahun sekarang
2. $PDRB_t$ = pertumbuhan tahun sekarang
3. $PDRB_{t-1}$ = pertumbuhan tahun sebelumnya

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu konsep penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai penerimaan atau pemasukan suatu daerah dari berbagai sumber di wilayahnya, PAD adalah hasil dari upaya daerah dalam mengumpulkan pendapatan yang sah dan legal. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa PAD meliputi berbagai sumber, antara lain hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu, penting untuk memahami definisi dan sumber-sumber PAD agar keuangan daerah dapat dikelola dengan efektif dan efisien.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Salah satu contoh adalah peningkatan pendapatan masyarakat, karena PAD digunakan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan pengembangan infrastruktur (Munandar, 2015).

Selain itu, PAD juga digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Wahyuni, 2017). Oleh karena itu, pendapatan asli daerah dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Namun, perlu diingat bahwa pengelolaan PAD harus dilakukan secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan masalah dalam penggunaan PAD tersebut (Rahardjo, 2019).

3. Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penyerahan wewenang secara keuangan dari pusat ke daerah merupakan desentralisasi fiskal. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal guna untuk menaikkan beberapa sektor ekonomi meliputi konsumsi yang meningkat, tenaga kerja yang terserap dengan banyak dan lain sebagainya. Memindahkan beberapa kebijakan keuangan pada pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan yakin bahwa anggaran harus dikelola efektif dan efisien agar berdampak pada pembangunan disebabkan oleh berlakunya desentralisasi fiskal (Hidayat, 2016). Perubahan akan sejahteranya masyarakat serta ekonomi yang untung akan dirasakan apabila desentralisasi dilakukan (Pose et all, 2016).

Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi akan memiliki nilai tinggi pada daerah yang memiliki potensi alam yang memadai atau tinggi sehingga dijadikan sebagai pusat bisnis. Hal tersebut menandakan bahwa kebijakan dalam desentralisasi fiskal memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan memberikan keluwesan dalam mengurus wewenangnya, ditujukan agar dapat memaksimalkan potensi ekonomi daerah, hal tersebut berakibat positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan melihat rata – rata pertumbuhan perkapita (Waluyo, 2007).

4. Investasi

Investasi merupakan pengeluaran dengan tujuan membeli beberapa modal untuk memproduksi beberapa barang serta pelayanan pada masa depan. Menanamkan modal dengan beberapa aktiva dengan jangka waktu tidak singkat agar mendapatkan laba di masa depan (Mulyati & Murni, 2018). Investasi terbagi menjadi dua yang pertama yakni penanaman modal dalam negeri atau PMDN serta penanaman modal asing atau disingkat PMA. Pada pemerintahan, investasi digunakan sebagai penunjang hidup dari masyarakat dari belanja modal dimana tidak terfokus pada keuntungan saja. Menjadi faktor penggerak pada pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Pembangunan yang tertata dengan sempurna dapat menjadi tolak ukur investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi pada suatu daerah. Peningkatan ekonomi akan terjadi karena hal tersebut, dan peningkatan akan terbukanya lapangan kerja juga semakin bertambah.

Investasi pada barang modal dapat menambah produksi dalam barang maupun pelayanan pada perekonomian sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang signifikan (Handayani, 2011). Keselarasan dalam belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Dengan pemerintah menetapkan belanja modal atau investasi yang besar dibandingkan pengeluaran dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut.

Dampak positif dapat dirasakan pada pendapatan daerah serta ekonomi daerah apabila investasi baik publik ataupun swasta ditingkatkan pengeluarannya. Tingginya pengganda investasi dapat meningkatkan kekayaan pada ekonomi dengan memiliki tolak ukur sebagai berikut:

$$K = \frac{1}{1 - MPC} = \frac{1}{MPS} = \frac{\Delta Y}{\Delta I}$$

Dimana hal tersebut memiliki arti terkait pada perubahan investasi itu sendiri. Besarnya ukuran pengganda dilihat seberapa besar dari ukuran MPC atau *Marginal Propensity to consume* yang berarti rasio dengan tujuan untuk menjelaskan seberapa banyak dana yang dibelanjakan ketika mendapat pendapatan dengan dana yang sudah disimpan. Dari nilai ganda tersebut dapat berubah menjadi tidak terbatas.

5. Belanja Daerah

Tingginya permintaan agregat disebabkan oleh kenaikan pengeluaran dalam suatu perencanaan. Total pendapatan dari perekonomian jangka pendek dapat diukur dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga, industri, serta institusi dalam membelanjakan pendapatan (Mankiw, 2006). Aturan tentang perekonomian dengan mengontrol besar kecilnya pendapatan serta pengeluaran pemerintah tiap tahun terdapat pada APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Kebijakan fiskal ditujukan untuk mengatur harga agar stabil, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Peran pemerintah diperlukan dalam mengelola pasar bebas agar kegiatan ekonomi tetap stabil. Pedapatan nasional yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh pengeluaran pemerintah yang berubah dapat digambarkan sebagai berikut:

$$kG = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{(1 - MPC)}$$

Dimana:

kG : Koefisien multiplier G

MPC : *Marginal Propensity to Consume*

Substitusi kedua persamaan menjadi :

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{(1 - MPC)}$$

$$\Delta Y = \frac{1}{(1 - MPC)} \times \Delta G$$

$$\Delta Y = kG \times \Delta G$$

Pengurangan dari belanja pemerintah memiliki akibat yang negatif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dimana bila belanja pemerintah tersebut digunakan kurang produktif.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dinarjito & Dharmaz (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur” memiliki tujuan untuk meninjau adanya pengaruh desentralisasi fiskal, investasi dan indeks pembangunan pada pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Kalimantan Timur. Dimana pada penelitian tersebut metode yang digunakan pada penelitian ini yakni kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi linear data panel. Melakukan pemilihan model estimasi terbaik diantaranya yakni *Pooled Least Square*, *Fixed Effect Models*, *Random Effect Models*, dengan melakukan uji *Chow*, *Hausman*, *Lagrange Multiplier*.

Hasil dari penelitian ini yakni variabel desentralisasi fiskal dan investasi daerah berpengaruh negatif tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Pohan & Yuliana (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 – 2019” bertujuan untuk menggambarkan secara umum nilai Produk Domestik Regional Bruto, rasio Pendapatan Asli Daerah, rasio Dana Bagi Hasil, rasio Dana Alokasi Umum, dan rasio Dana Alokasi Khusus serta mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Utara.

Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensia. Terdapat tiga spesifikasi model dalam regresi data panel yang dapat terbentuk berdasarkan tiga pengujian melalui uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Breuch-Pagan Lagrange Multiplier*.

Penelitian ini memiliki hasil yakni secara parsial rasio Pendapatan Asli Daerah dan rasio Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio Dana Bagi Hasil dan rasio Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pemerintah Kabupaten / Kota dapat meningkatkan nilai rasio Pendapatan Asli Daerah dan rasio Dana Alokasi Khusus agar terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Wahyudi & Wahyudin (2022) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2016–2020”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten / kota di Sulawesi Selatan tahun 2016 – 2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni analisis deskriptif dan analisis inferensia.

Terdapat tiga spesifikasi model dalam regresi data panel yang dapat terbentuk berdasarkan tiga pengujian melalui uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Breuch*. Dengan melakukan pemeriksaan asumsi klasik agar bersifat *Best Linear Unbiased Estimator*. Terakhir melakukan uji kelayakan model dengan melihat koefisien determinasi, hasil uji simultan dan parsial.

Hasil penelitian yakni rasio Dana Bagi Hasil dan rasio Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan, rasio Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten / kota di Sulawesi Selatan tahun 2016 - 2020. Rasio Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi kabupaten / kota di Sulawesi Selatan.

Aziz, Tampubolon, Desweni (2022) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 12 kabupaten / kota Provinsi Riau tahun 2012 – 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal diwakili oleh variabel (Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) di kabupaten / kota Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan menggunakan metode *Chow Test*, *Hausman Test*. Pada tingkat kabupaten / kota di Provinsi Riau tahun 2012-2020.

Hasil dari penelitian ini yakni Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten / kota Provinsi Riau.

Dalam penelitian ini, Nurlaili (2022) melakukan analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan merupakan penelitian kuantitatif yang sistematis terhadap bagian – bagian fenomena serta kualitas hubungannya.

Desentralisasi fiskal melibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal. Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembelian/pembangunan barang atau asset tetap berwujud dengan nilai manfaat lebih dari satu tahun. Penelitian ini menggunakan uji *Chow* untuk memilih model *common effect* atau *fixed effect*, serta uji *Hausman* untuk memilih model *random effect* dan *fixed effect*. Selain itu, dilakukan uji normalitas, uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi R²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sementara Belanja Modal memiliki pengaruh negatif signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat untuk menyeimbangkan pendapatan setiap Kabupaten / Kota mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pengeluaran untuk belanja modal cenderung memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Rahmanda (2018), dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten / Kota Provinsi Papua” memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Papua, dengan menggunakan indikator penerimaan, pengeluaran, dan otonomi sebagai variabel penelitian.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, dengan model terbaik yang dihasilkan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator penerimaan (memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator pengeluaran dan otonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten / Kota Provinsi Papua.

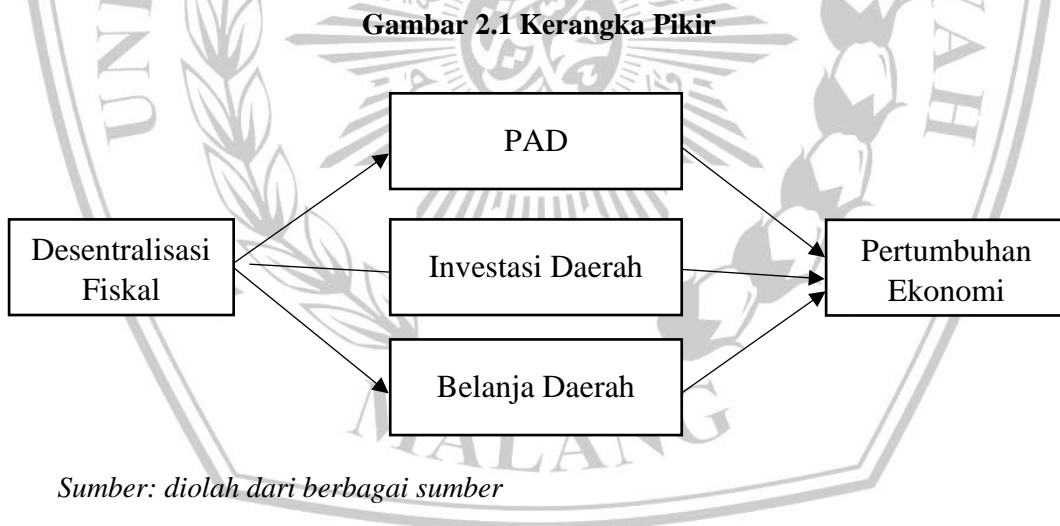
Relevansi dari 6 penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini sebagai berikut:

1. Pada penelitian Dinarjito & Dharmaz (2020) terdapat perbedaan satu variabel yang diteliti dimana pada penelitian tersebut menggunakan variabel indeks pembangunan manusia, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel belanja daerah.
2. Pada penelitian Pohan & Yuliana (2021) menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto, rasio Pendapatan Asli Daerah, rasio Dana Bagi Hasil, rasio Dana Alokasi Umum, dan rasio Dana Alokasi Khusus. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel PAD, investasi daerah, belanja daerah dan Produk Domestik Regional Bruto.

3. Wahyudi & Wahyudin (2022), Aziz, Tampubolon, Desweni (2022) dan penelitian Nurlaili (2022) memiliki perbedaan variabel yang diteliti, namun menggunakan metode yang sama yakni analisis regresi linear berganda dengan memilih pendekatan yang terbaik dari *common effect*, *fixed effect*, *random effect*.
4. Rahmanda (2018) memiliki variabel yang sedikit berbeda untuk diteliti, dimana menggunakan variabel yang diwakili oleh indikator penerimaan, pengeluaran dan otonomi daerah. Model *fixed effect* dipilih oleh peneliti Rahmanda, sedangkan *Random effect* digunakan pada penelitian ini.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu, maka PAD, Investasi Daerah dan Belanja Daerah diduga berpengaruh terhadap Produk Regional Bruto.



Pada kerangka pemikiran memberikan penjelasan singkat mengenai kerangka pikir yang dibuat serta variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan begitu setiap pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam mengatur urusan keuangannya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Dalam penelitian ini pengukuran desentralisasi fiskal menggunakan tiga indikator yaitu Pendapatan Asli Daerah, Investasi Daerah dan Belanja Daerah. Apabila nilai yang dihasilkan besar maka kewenangan di suatu daerah tinggi. Artinya daerah tersebut mampu dan berhasil dalam mengelola daerah dengan benar berupa menciptakan efisiensi dalam penggunaan dana maupun penerimaan yang dihasilkan sendiri oleh daerah yang bersangkutan mengenai pelayanan publik. Sebagai acuan dalam kerangka pikir, disajikan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis:

1. Diduga PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
2. Diduga Investasi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
3. Diduga Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

D. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara Pendapatan Daerah (PAD) dengan pertumbuhan ekonomi adalah topik yang sangat menarik dalam bidang keuangan publik. Menurut teori fiskalisme, PAD berperan penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dengan memberikan sumber daya untuk pengembangan infrastruktur, pembentukan sumber daya manusia, dan program kesejahteraan sosial (Musgrave, 1963). Teori pilihan publik juga mengatakan bahwa PAD dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif bagi investasi swasta dan kewirausahaan (Buchanan, 1964).

Selain itu, konsep kebijakan fiskal menunjukkan bahwa PAD dapat digunakan sebagai cara untuk stabilisasi ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengatur tingkat pengeluaran pemerintah dan pajak (Friedman, 1968). Teori pengembangan wilayah juga menekankan pentingnya PAD dalam meningkatkan pengembangan wilayah dengan memberikan sumber daya untuk infrastruktur lokal dan pembentukan sumber daya manusia (Higgins, 1979).

H₀: PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H₁: PAD tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

2. Pengaruh Investasi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi digunakan sebagai faktor penggerak pada pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Pembangunan yang tertata dengan sempurna dapat menjadi tolak ukur investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi pada suatu daerah. Peningkatan ekonomi akan terjadi karena hal tersebut, dan peningkatan akan terbukanya lapangan kerja juga semakin bertambah. Investasi menjadi variabel independent yang memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut (Patanduk, Rumat, Nauko. 2019) bertambahnya investasi akan berdampak pada kenaikan pendapatan perkapita dan sebaliknya.

H2 : Investasi Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

**H3 : Investasi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan
Ekonomi**

3. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Pemerintah dapat berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi. Terjadinya kenaikan belanja yang kurang produktif memiliki dampak bagi turunnya tingkat *saving* serta pertumbuhan ekonomi. Bengkaknya kenaikan belanja yang kurang produktif seperti konsumsi pegawai dan lain sebagainya kurang dapat mempengaruhi tingkat produktifitas sisi swasta namun meningkatkan pajak pendapatan. Belanja produktif yang dilakukan pemerintah seperti membangun dalam bidang infrastruktur dan dari segi pendidikan mampu menaikkan tingkat produktifitas dalam sisi positif pertumbuhan ekonomi daerah. Kemampuan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan dampak yang dihasilkan oleh belanja daerah sangat kecil, karena besarnya pengeluaran terhadap belanja tidak langsung atau belanja pegawai dan belanja langsung mencakup belanja modal (Fitriyani, et al. 2020).

H3 : Belanja Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H4 : Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi